



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026**

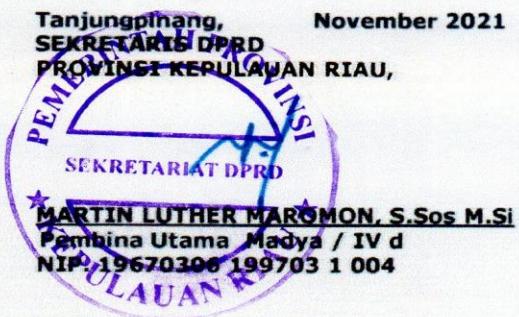
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021**

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah Subhanallahu Wa ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD selama lima tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan rencana teknis lima tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance and Clean Government*) menuju Kepulauan Riau Makmur Berdaya Saing dan Berbudaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.....	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	7
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD	14
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	53
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55
3.3 Telaah Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra.....	59
3.4 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi.....	59
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VIII	PENUTUP.....	74
	8.1. Pedoman Transisi.....	74
	8.2. Kaidah Pelaksana.....	74
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah membawa perubahan besar pada sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu adanya harapan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah berupa kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Dalam konteks reformasi perencanaan, salah satu aspek yang mendapat perhatian untuk dilaksanakan adalah peningkatan kinerja perencanaan dan pengendalian. Hal ini disebabkan dalam sistem manajemen, keberhasilan pembangunan terletak pada sejauh mana adanya perencanaan dan pengendalian yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh sesuai kondisi daerah. Menyadari besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang diemban maka Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pemberahan internal yang salah satunya melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan lebih fokus, terarah dan optimal.

Renstra Sekretariat DPRD ini adalah serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang akan diimplementasikan secara bersama-sama oleh pimpinan dan seluruh komponen Perangkat Daerah (PD).

Renstra Sekretariat DPRD ini merupakan implementasi dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Didalam Renstra ini dimuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Sekretariat DPRD. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembar Negara RI Tahun 2017 nomor 136);
14. Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
15. Keputusan Presiden Nomor 60/P tahun 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021.
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional.
17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan sturktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, tambahan lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun 2009 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1).
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepri tahun 2021-2026
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk kurun waktu Tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran atas visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD guna menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran melalui penjabaran yang spesifik dan terukur.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD sebagai dokumen perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2021-2026.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan, serta memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD

Renstra Sekretariat DPRD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD.

Bab II. Gambaran pelayanan sekretariat DPRD, berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD; Sumber Daya Sekretariat DPRD; Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD; Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Sekretariat DPRD.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu strategis Sekretariat DPRD berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/Ldan Rentra; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan, dan Sasaran berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan berisikan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

- Bab VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- Bab VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berisikan indikator kinerja sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BabVIII. Penutup, berisi tentang Pedoman Transisi; dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

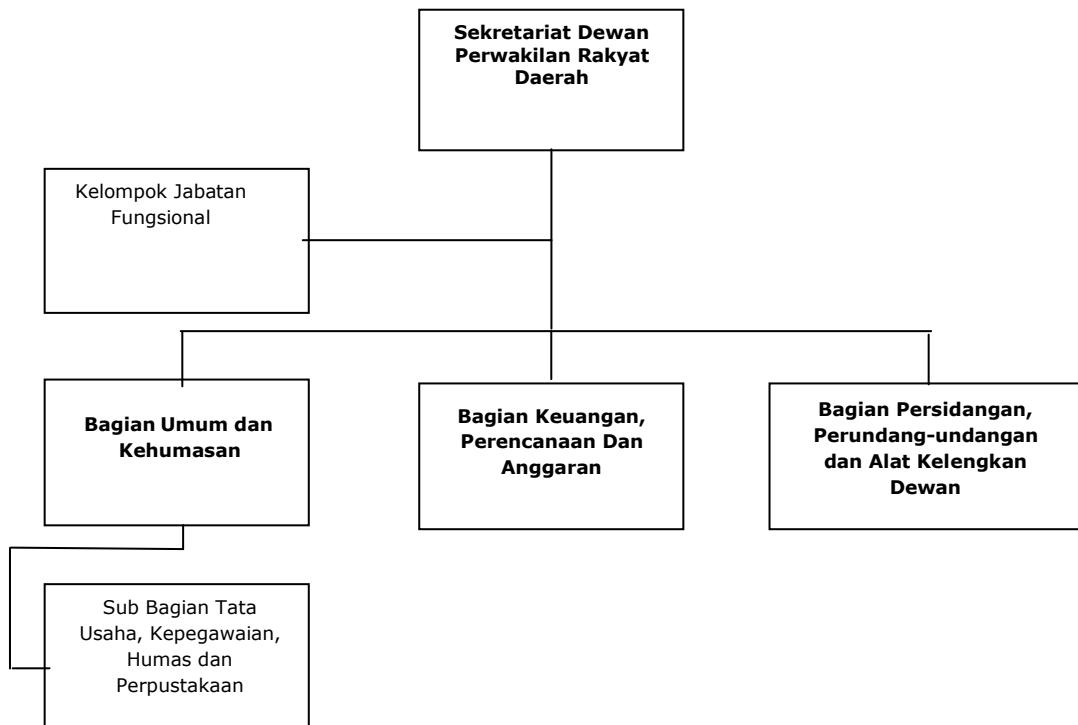
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut.

1. Bagian Umum dan Humas terdiri dari :
2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan;
3. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran ;
4. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan, terdiri dari ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



Sumber:Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD , serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi rapat DPRD; dan

- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD, Gubernur dan Sekretaris Daerah.

1. Bagian Umum dan Kehumasan

Bagian Umum dan Kehumasan mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan urusan administrasi tatausaha, kepegawaian, humas dan perpustakaan serta rumah tangga, perlengkapan dan protokol. Untuk menyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Kehumas, mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum dan Kehumasan berdasarkan program kerja Bagian Umum dan Kehumasan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Kehumasan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Kehumasan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bagian Umum dan Kehumasan;
- e. Menyusun dan megkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait tata usaha, kepegawaian, humas dan perpustakaan;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait rumah tangga, perlengkapan dan protokol;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Kehumasan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum dan Kehumasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Umum dan Kehumas terdiri dari : Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan.

a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan;
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 6) Melaksanakan operasional berbagai kegiatan DPRD melalui dokumentasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
- 8) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan;

- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Anggaran

Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan urusan administrasiverifikasi, pembukuan, pertanggungjawaban, Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dilingkungan bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan

Bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan urusan administrasi rapat, Persidangan, risalah, Perundangan-undangan dan alat kelengkapan dewan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait rapat, persidangan dan risalah;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perundang-undangan dan alat kelengkapan dewan;

- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bagian Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, Sekretariat DPRD memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 325 orang yang terdiri dari 76 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 0 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 105 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 144 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Idealnya dengan beban kerja yang dihadapi selama 5 (lima) tahun kedepan maka jumlah pegawai keseluruhan yang diperlukan adalah sebanyak 241 orang dengan rincian seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Saat Ini (2021)	Kebutuhan (2026)
1	PNS	76	115
2	CPNS	0	0
3	PTT	105	36
4	THL	144	90
	Jumlah	325	241

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Tahun 2021

Selanjutnya, apabila melihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka kondisi saat ini pada tahun 2021 dengan kondisi ideal yang diinginkan pada tahun 2026 adalah sebagaimana terlihat dan tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Saat Ini (2021)			Kebutuhan (2026)
		Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Golongan IV	5	0	5	11
	a.IV / d	1	0		4
	b.IV / b	1	0		6
	c.IV / a	3	0		
2	Golongan III	32	18	50	52
	a.III / d	3	1		4
	b.III / c	12	6		21
	c.III / b	9	5		14

No	Golongan Ruang	Saat Ini (2021)			Kebutuhan (2026)
	d.III / a	8	6		13
3	Golongan II	14	7	21	25
	a.II / d	0	0		6
	b.II / c	7	6		3
	c.II / b	2	0		16
	d.II / a	5	1		0
4	Golongan I		0	0	0
	a. I / d	0	0		0
	b.I / c	0	0		0
	c.I / b	0	0		0
	d.I / a	0	0		0
		51	25	76	

Sumber : Subbag TU dan Kepgawaiyan Tahun 2021

Dari sisi latar belakang pendidikan, kondisi saat ini dan kondisi ideal dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Saat Ini (2021)			Kebutuhan (2026)
		Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Doktoral (S3)	1	0		1
2	Paska Sarjana (S2)	7	1		11
3	Sarjana (S1)	20	12		35
4	Diploma (D3)	9	6		15
5	SLTA	13	7		22
	Jumlah Total	50	26	76	84

Sumber : Subbag TU dan Kepgawaiyan Tahun 2021

Dari sisi jabatan eselonering pegawai Sekretariat DPRD pada tahun 2021 dan harapan di tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	Saat Ini (2021)			Kebutuhan (2026)
		Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Eselon II A	1	0		1
2	Eselon III A	3	0		3
3	Eselon IV A	1	0		1
4	Grade 7	19	9		34
5	Grade 6	9	6		16
6	Grade 5	13	7		23
7	Fungsional	4	4		8

	Jumlah Total	50	26	76	86
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Tahun 2021

2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dari sisi sumber daya sarana prasarana, Sekretariat DPRD saat ini sudah memiliki aset yang cukup memadai untuk menjalankan roda organisasi, baik sarana prasarana berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang pengadaan dan pemeliharaannya selama ini dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut uraian sarana prasarana sebagaimana dimaksud :

Tabel 5.
Kendaraan Bermotor

No	Sarana Prasarana	Saat Ini (2021)			Kebutuhan (2026)
		Jml	Kondisi baik	Kondisi Rusak	
1	Kendaraan Roda 4	42	39	3	0
2	Kendaraan Roda 2	4	4	0	0
	Jumlah	46	43	3	0

Sumber : Pengurus Barang

Tabel 6.
Sarana Prasarana Lainnya

No	Sarana Prasarana	Saat Ini (2021)			Kebutuhan (2026)
		Jml	Kondisi baik	Kondisi Rusak	
1	PC	218	149	69	220
2	Laptop / Notebook	261	189	72	265
3	Proyektor	20	6	14	20
4	Screen Proyektor	15	15	0	20
5	Whiteboard Elektric	11	11	0	15
6	Whiteboard Interaktif	3	3	0	5
7	Televisi	137	103	34	140
8	LCD	2	2	0	7
10	Harddisk External	72	72	0	72
11	Mesin Foto Copy	10	6	4	10
12	Printer	230	167	63	240
13	Faximili	10	10	0	20
14	Video Mixer	1	1	0	2
15	Headset	15	0	15	20
16	Handy Talky (HT)	37	30	7	45
17	Tape Recorder Digital	29	25	4	35
18	Handycam	4	4	0	10
19	Lensa/Tele	7	7	0	10

No	Sarana Prasarana	Saat Ini (2021)			Kebutuhan (2026)
		Jml	Kondisi baik	Kondisi Rusak	
20	Kamera/Semi Pro	9	9	0	10
21	Kamera/Pro	23	18	5	25
22	Meja Kerja (Meja Operator)	127	96	31	185
23	Lemari Ruang AKD	21	16	5	30
24	Bendera Merah Putih	55	20	35	55
25	Bendera Logo	20	15	5	55
26	Tiang Bendera	50	43	7	50

Sumber : Pengurus Barang

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Mengacu kepada uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi diatas, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dapat digambarkan pada peran utamanya sebagai unit kerja yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam proses pengambilan kebijakan di daerah.

Selama periode 2016 – 2021, kinerja pelayanan telah diupayakan diraih secara optimal. Namun demikian upaya tersebut masih menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Untuk itu pada periode 2021 – 2026, penguatan terhadap pencapaian kinerja pelayanan akan semakin ditingkatkan untuk dapat memberikan hasil yang optimal bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Berikut ini adalah rangkuman kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya selama 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 7.
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Targ et Indi kato r Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Tahun Ke				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
¹	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	96		87	88	90	92	94	96	86.90	100	100	100	100	n/a	99.89	113.64	111.11	108.70	106.38
²	Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	96		87	88	90	92	94	96	87	100	100	100	100	n/a	114.94	113.64	111.11	108.70	106.38
³	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	70		60	62	64	66	68	70	n/a	62	64	66	68	n/a	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kirnerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Targ et Indi kato r Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Ratio Capaian Tahun Ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
⁴	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	100	100	
⁵	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	96		87	88	90	92	94	96	87	100	100	100	100	n/a	114.94	113.64	111.11	108.70	106.38	
⁶	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	14		n/a	n/a	n/a	12	12	14	n/a	n/a	n/a	n/a	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75	

NO	Indikator Kirnerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Targ et Indi kato r Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Ratio Capaian Tahun Ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	95		n/a	n/a	95	95	95	95	n/a	n/a	163	183	186	n/a	n/a	n/a	171.58	192.63	195.79	
8	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	135		n/a	n/a	135	135	135	135	n/a	n/a	135	135	135	n/a	n/a	n/a	100	100	100	
9	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100	100	

NO	Indikator Kirnerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Targ et Indi kato r Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Ratio Capaian Tahun Ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
¹⁰	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100	100	
¹¹	Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD	96		87	88	90	92	94	96	87	100	100	100	100	n/a	114.94	113.64	111.11	108.70	106.38	
¹²	Pemenuhan kebutuhan pakaian petugas dan penunjang disiplin aparatur	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100	100	

NO	Indikator Kirnerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Targ et Indi kato r Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Ratio Capaian Tahun Ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
¹³	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100	100	
¹⁴	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100	100	
¹⁵	Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	100	100	100	100	100	

NO	Indikator Kirnerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Targ et Indi kato r Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Ratio Capaian Tahun Ke				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
¹⁶	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	n/a	100	100	100	100	100

Sumber Evaluasi Renstra Sekretariat DPR

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dapat dilihat dari 16 indikator, seperti Persentase Pelayanan Humas dan Keprotokolan DPRD Sesuai SOP Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 bahwa target Persentase Pelayanan Humas dan Keprotokolan DPRD sesuai SOP adalah 87% yakni 7 jumlah spesifikasi produk pelayanan humas dan keprotokolan yang harus dilaksanakan dari 8 jumlah spesifikasi produk pelayanan humas dan keprotokolan yang telah ditetapkan. Namun yang terealisasi adalah 7 jumlah spesifikasi produk pelayanan humas dan keprotokolan atau 99.98% dari 8 jumlah spesifikasi produk pelayanan humas dan keprotokolan sehingga hal ini menunjukkan pencapaian kinerjanya diatas 86.90% atau baik yakni 99.89%. Berdasarkan SOP pelayanan administrasi keuangan DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 6 jumlah spesifikasi produk pelayanan administrasi keuangan DPRD yang harus dilaksanakan yakni antara lain : RKA, DPA, Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas, Verifikasi Surat Pertanggungjawaban, Pada tahun 2016 yang terealisasi hanya 6 jumlah spesifikasi produk pelayanan administrasi keuangan DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 yakni Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD sesuai SOP dengan target 87% dan realisasi 100% sehingga pencapaian kinerjanya 114,94%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD sesuai SOP adalah sangat baik karena pencapaiannya diatas 100%.

Spesifikasi Produk Pelayanan Administrasi Keuangan	Output / Keluaran
a. RKA	Dokumen RKA telah disusun tepat waktu pada bulan Desember 2015 untuk pelaksanaan anggaran 2016
b. DPA	Dokumen DPA telah disusun tepat waktu pada bulan Desember 2015 untuk pelaksanaan anggaran 2016
c. Belanja Pegawai	Berdasarkan LRA 2016 Belanja Pegawai (BTL+BL) sebesar Rp.144.934.489.623.00 dan realisasi sebesar Rp. 139.522.324.783.00 (96.27%). Penggajian PNS,dan Anggota DPRD dilaksanakan pada awal bulan dan Tunjangan Prestasi Kerja PNS dan Gaji PTT pada akhir bulan secara tepat waktu.
d. Belanja Barang dan JAsa	Berdasarkan LRA 2016 Belanja Barang dan Jasa (BL) sebesar Rp.119.263.533.935.00 dan realisasi sebesar Rp. 115.748.107.858.00 (97.05%).
e. Belanja Perjalanan Dinas	Menurut LRA per 31 desember 2016 perjalanan dinas dalam daerah : 21.946.896.732.00 dan realisasi Rp.21.788.013.852.00, perjalanan luar daerah : 17.254.573.970.00 dan realisasi Rp. 17.069.963.187.00 dan perjalanan luar negeri : 1.250.000.000.00 dan realisasi Rp.1.105.712.929.00. Persentasinya mencapai (98.79%)
f. Verifikasi surat pertanggungjawaban	Standar operasional Keuangan mencakupi <ul style="list-style-type: none"> A. Persyaratan: ada (lengkap) B. Prosedur : ada (lengkap) C. Spesifikasi thd produk pelayanan :ada (lengkap) D. Waktu : berdasarkan Anggaran kas pada dokumen DPA E. Biaya :Sesuai Anggaran pada DPA 2015 F. Kompetensi petugas : G. Sarana dan Prasarana : Alat sarana penunjang kinerja Telah Memadai

Pada tabel capaian kinerja 2016 tidak tercapainya target kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayan Sekretariat DPRD dikarenakan tidak memungkinkan waktu pelaksanaan yang tinggal 1 bulan dari ditetapkannya Indikator Sekretariat DPRD pada visi dan misi Gubernur Kepri dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan di tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Berdasarkan SOP pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 16 jumlah spesifikasi produk pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD yang harus dilaksanakan yakni antara lain rapat paripurna dan paripurna istimewa; rapat fraksi; rapat badan musyawarah; rapat badan legislatif; rapat gabungan; rapat komisi; rapat kerja; rapat dengar pendapat; rapat badan kehormatan; keputusan DPRD; keputusan pimpinan DPRD; keputusan Sekretaris DPRD; rapat kerja komisi; kunjungan kerja komisi; penyampaian surat dinas komisi kepada pimpinan dewan atau pihak terkait lainnya secara prosedural kedinasan dan administrasi surat kedinasan. Pada tahun 2016 yang terealisasi hanya 16 jumlah spesifikasi produk pelaksanaan sidang dan risalah DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD sesuai SOP dengan target 87% dan realisasi 100% sehingga pencapaian kinerjanya 114,94%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD sesuai SOP adalah sangat baik karena pencapaiannya diatas 100%.

Selanjutnya, Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD sebanyak 3 kali, Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD sebanyak 3 kali setiap tahunnya dengan jumlah Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota DPRD seluruh anggota sebanyak 45 orang setiap tahunnya.

Kinerja sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan terhadap anggota DPRD dapat dilihat dari beberapa indikator, Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP, Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP, indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD,

Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP, tercapainya target indikator tersebut dikarenakan konsistensi para pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD menjalankan tugas dan fungsinya, Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi sekretariat DPRD: belum optimalnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD, terlihat dari Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Solusi yang diusulkan dalam memecahkan permasalahan adalah: meningkatkan penerapan SOP dalam pelayanan kepada anggota DPRD sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi DPRD dengan baik.

Berdasarkan program yang diampu dan dilaksanakan maka capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat seperti pada uraian berikut ini:

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
I	4.01 . 4.014 . 01	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik									
	4.01 . 4.014 . 01	Kegiatan :										
1	4.01 . 4.014 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
2	4.01 . 4.014 . 01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
3	4.01 . 4.014 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administraasi Keuangan Sekretariat DPRD	12	12	0	0	0	0	12	1.0	Bulan

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	4.01.4.01.4.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
5	4.01.4.01.4.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya Jasa Pendukung Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
6	4.01.4.01.4.01.20	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Rutinitas Perkantoran	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
7	4.01.4.01.4.01.22	Rapat-rapat Internal Eksternal Kedalam dan Luar Daerah	Terlaksanya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8	4.01.4.01.4.01.23	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
II	4.01.4.01.4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas									
	4.01.4.01.4.02	Kegiatan :										
1	4.01.4.01.4.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD	Tersedianya Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD	0	12	0	0	0	0	12	3.0	Bulan
2	4.01.4.01.4.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3	4.01.4.01.4.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Sekretariat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Sekretariat	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
5		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan DPRD Provinsi Kepri	0	0	0	0	0	0	0	0	Bulan
6	4.01.4.01.4.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
7	4.01.4.01.4.02.04	Peningkatan Sarana Humas dan Informasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Sarana Humas dan Informasi DPRD Provinsi Kepri	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
8	4.01.4.014.02.06	DED Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya DED Bangunan Serbaguna Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
9	4.01.4.014.02.07	DED Pengadaan Kapal Ferry Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya DED Kapal Ferry Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
10	4.01.4.014.02.08	DED Pengadaan Elevator Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya DED Elevator Kantor DPRD Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
11	4.01.4.014.02.09	Pengadaan Elevator Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Pengadaan Elevator Kantor DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
12	4.01.4.01.4.02.10	Kegiatan Pengadaan Aplikasi dan Server Data Base Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Aplikasi dan Server Data Base Produk Hukum Sekretariat DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
13		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	36	3.0	Bulan
III	4.01.4.01.4.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur Daerah yang baik									
	4.01.4.01.4.03	Kegiatan :										
	4.01.4.01.4.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakai Dinas Berserta Perlengkapannya	1	1	1	1	100	1	3	3.0	Pake

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
IV	4.01 . 4.01.4 . 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Baik									
	4.01 . 4.01.4 . 04	Kegiatan :										
	4.01 . 4.01.4 . 04 . 08	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD	Tersusunnya LAKIP sekretariat DPRD	6	6	6	6	100	6	18	3.0	Laporan
	4.01 . 4.01.4 . 04 . 13	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP sekretariat DPRD	25	25	25	25	100	25	75	3.0	Dokumen
		Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Bulanan, Triwulan dan Semester	Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Bulanan, Triwulan dan Semester									

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
IV	4.01 . 4.014 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'Meningkatnya Kapsitas Sumber Daya Apartur yang Baik									
	4.01 . 4.014 . 05	Kegiatan :										
1	4.01 . 4.014 . 05.01	Kegiatan Penunjang Keprotokoleran	Terlaksanya Kegiatan Penunjang Keprotokoleran	0	1	0	0	0	1	1	1	Kali
2	4.01 . 4.014 . 05.02	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan	3	3	0	0	0	3	6	2	Kali(Org)

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3	4.01.4.014.05.03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Keuangan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Keuangan	3	3	0	0	0	3	6	3.0	Kali(Org)
4	4.01.4.014.05.04	Penunjang Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
5	4.01.4.014.05.05	Peningkatan Kapasitas Pegawai Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pegawai Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kepri	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan(Org)

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
6	4.01.4.014.05.06	Pelatihan Operator dan Sosialisasi Aplikasi Produk hukum	Terlaksananya Pelatihan Operator dan Sosialisasi Aplikasi Produk hukum	1	0	0	0	0	0	0	0	Kali
7	4.01.4.014.05.07	Peningkatan Kapasitas Humas dan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Humas dan Sekretariat	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali
VI	4.01.4.014.07	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
	4.01.4.014.07	Kegiatan :										

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %				
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	4.01.4.014.07.01	Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Hearing Dialog dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
3	4.01.4.014.07.02	Kegiatan Reses	Terlaksananya Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	3	3	3	3	100	3	9	3.0	Kali
4	4.01.4.014.07.03	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	36	3.0	

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5	4.01.4.014.07.04	Rapat Kerja Pimpinan DPRD Se-Indonesia	Terlaksananya Rapat Kerja Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
6	4.01.4.014.07.05	Kegiatan Parlementaria	Terlaksananya Kegiatan Parlementaria	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
7	4.01.4.014.07.06	Rapat - rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau	6	6	6	6	100	6	18	3.0	Kali
8	4.01.4.014.07.07	Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD	Terlaksananya Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	2	2	2	2	100	2	6	3.0	Kali

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
9	4.01.4.014.07.08	Kegiatan Punjang Fraksi DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
	4.01.4.014.07.09	Penunjang Kehumasan dan Dokumentasi Anggota DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Kehumasan dan Dokumentasi DPRD	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
12	4.01.4.014.07.08	Publik Hearing DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Publik Hearing	12	12	12	0	0	12	24	2.0	Bulan

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
10	4.01.4.014.07.09	Penunjang Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
11	4.01.4.014.07.12	Penunjang Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Prov Kepr	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
12		Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Terlaksananya Indeks DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	1	1	1	1	100	1	3	3.0	Kali
13		Pembuatan Profil DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya dan Tersusunnya Profil DPRD	0	150	0	0	0	0	150	150	Buku
14		Penguatan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penguatan Peran dan Pungsi Set-DPRD	12	12	12	0	100	0	36	3.0	Kali

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	4.07 . 4.014 . 08	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP									
1	4.07 . 4.014 . 08.01	Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD	Jumlah ranperda dan produk hukum yang di bahas	12	16	12	7	58.3	14	37	3.08	Produk Hukum
2	4.07 . 4.014 . 08.02	Pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah perda inisiatif yang tersusun	4	1	1	1	100	5	7	2.3	Perda
3	4.07 . 4.014 . 08.03	Pembuatan Naskah Akademis	Jumlah dokumen naskah akademis	4	2	2	2	100	5	9	2.2	Dokumen
4	4.07 . 4.014 . 08.04	Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang dilakukan sinkronisasi terhadap produk hukum	12	12	0	0	0	0	12	1.0	Bulan

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
VII I	4.01.4.01.4.13	Program Pengembangan Data / Informasi										
1	4.01.4.01.4.13.01	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	Tersedianya Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
IX	4.01 . 4.01.4 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik									
	4.01 . 4.01.4 . 21	Kegiatan :							0	0		
1	4.01 . 4.01.4 . 21 . 08	Kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100	100	100	100	100	100	300	3.0	Buku

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2		Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepri	0	1	0	0	0	0	1	1	Dokumen
3	4.01.4.01.4.21.09	Pemantauan Prosedur Perencanaan Sekretariat DPRD	Terlaksana Pemantauan Prosedur Perencanaan Sekretariat DPRD	1	1	1	1	100	1	3	3.0	Dokumen
4	4.01.4.01.4.21.10	Pemantauan Prosedur Keuangan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pemantauan Prosedur Keuangan Sekretariat DPRD	1	1	1	1	100	1	3	3.0	Dokumen
5	4.01.4.01.4.21.11	Evaluasi Kebijakan Perencanaan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan Perencanaan	3	3	3	3	100	3	9	3.0	kali

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
6	4.01.4.01.4.21.12	Evaluasi Kebijakan Keuangan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan Keuangan	3	3	3	3	100	3	9	3.0	kali
7	4.01.4.01.4.21.13	Penyusunan Standar Operasional Prosedur/SOP Sekretariat DPRD	Tersedianya Dokumen SOP Sekretariat DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Dokumen
8		Sosialisasi Standart Operasional Prosedur Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Sosialisasi SOP Sekretariat DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali
9		Penyusunan Draft Standar Operasional Prosedur DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersusunnya Draft SOP DPRD DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali

Tabel 8
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan	Satuan	
				2017	2018	2019	2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
10		Kajian Beban Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Kajian Beban Kerja Sekretariat DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali
X		Peningkatan Publikasi Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Publikasi Komunikasi dan Informasi									
1	4.07.4.01.4.08.01	Kegiatan Parlementaria	Terpenuhinya kegiatan publikasi eksternal DPRD	12	12	12	12	100	12	36	3.0	Bulan
2	4.07.4.01.4.08.02	Kegiatan Reses	Terlaksananya Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	3	3	3	3	100	3	9	3.0	Kali

Sumber : Evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Secara umum kinerja pelayanan yang tertuang dalam program ini telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja selama 4 tahun dengan capaian kinerja mencapai 100 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah :

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fasilitasi terhadap kinerja DPRD dalam dukungan sarana dan prasaran menunjang kelancaran kegiatan DPRD selama 4 tahun dapat dikatakan berhasil dan dapat dilihat pada tabel di atas.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk program ini, capaian kinerja pelayanan secara umum selama 4 tahun juga sudah cukup baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel

1.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Capaian kinerja pelayanan dalam program ini telah terlaksana dengan capaian 100 % seperti dapat dilihat pada tabel di atas :

1.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam program ini, capaian kinerja pelayanan selama 4 tahun sudah cukup baik dengan capaian 100 % seperti pada tabel diatas Nilai hasil evaluasi LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan belum

konsisten masih perbaikan, dari tahun 2011-2013 memperoleh nilai C kemudian pada tahun 2014-2015 memperoleh nilai A dan pada tahun 2016-2021 memperoleh nilai BB.

6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini adalah kinerja pelayanan yang paling vital dan penting karena berkaitan dengan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. Selama 4 tahun kinerja pelayanan program ini terlaksana dengan baik.

7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara umum kinerja pelayanan yang tertuang dalam program ini telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja selama 4 tahun dengan capaian kinerja mencapai 100 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas:

8) Program Program Pengembangan Data / Informasi

Program ini didukung oleh Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu secara umum dapat dilihat pada tabel diatas capaian kinerja selama 4 tahun dapat terlaksana dengan baik

9) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Kinerja kegiatan yang mendukung program penataan peraturan perundang-undangan tidak optimal dikarenakan kurang matangnya pengukuran formulasi untuk mencapai capaian target rumusan kegiatan Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD

10) Peningkatan Publikasi Komunikasi dan Informasi

Terakomodirnya kegiatan reses anggota DPRD dalam tabel selama empat tahun dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota DPRD yang diatur dalam perundang-undangan

Tabel 9. Kinerja Realisasi Keuangan Tahun 2017 – 2021 (dalam juta rupiah)

No	Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada tahun ke-				Rasio Capaian Pada tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	38.003	30.326	30.319	23.065	35.268	28.730	27.570	22.072	92,80	93.14	90.93	95.69	0.0009	0.0938
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.898	11.565	6.250	6.112	13.166	7.634	6.097	5.954	82,82	92.30	97.00	97.41	0.0064	0.1964
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	764	850	860	99	600	699	711	96	78,55	82.34	83.68	100	0.0088	0.0105
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.950	1.970	400	95	1.816	1.565	396	45	93.15	95.16	99.22	47.38	0.0299	0.7490
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	225	400	400	214	200	355	399	212	89,12	98.36	99.85	99.28	0.0222	0.0241
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	80.006	66.060	57.483	56.419	77.706	78.638	56.491	53.998	97,14	98.28	98.28	93.28	0.0022	0.0533
VI I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.200	2.750	311	2.500	2.969	2.187	947	282	92.81	98.93	90.23	90.57	0.0136	0.6563
VI II	Program Pengembangan Data / Informasi	1.246	1.000	820	604	327	434	611	582	26,31	66.81	90.60	96.46	0.0539	0.0202
IX	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	16.194	11.820	5.200	750	15.620	7.319	4.997	610	96.45	98.97	96.10	81.40	0.0122	0.3445
X	Peningkatan Publikasi Komunikasi dan Informasi	n/a	n/a	25.364	29.670	n/a	n/a	25.350	29.473	n/a	n/a	99.95	99.33	0.1158	0.1159

Sumber : Evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021

Realisasi anggaran program Peningkatan Sarana dan Prasaraana Aparatur rendah disebabkan penurunan dana bagi hasil yang mempengaruhi pembayaran kegiatan pada tahun 2018, sehingga baru bisa dibayarkan pada tahun 2019.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tantangan adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi sementara itu peluang adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya.

Sekretariat DPRD pada tahun 2021 ini akan memasuki tahapan V RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dimana tantangan dan peluang pada tahapan sebelumnya menjadi catatan penting untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah yang belum tuntas dan dalam merumuskan apa yang akan dilakukan 5 (lima) tahun mendatang.

Pada periode 2021 - 2026 yang akan datang, diperkirakan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau diantaranya :

- 1) Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan DPRD semakin besar, maka menjadi tantangan bagi sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada DPRD agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.
- 2) Masih kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk membantu membahas masalah-masalah krusial di DPRD. Hal ini menjadi tantangan bagi sekretariat DPRD untuk mencari tenaga ahli yang berkualitas untuk mendukung kinerja DPRD.
- 3) Penyelenggaraan Pemerintahan yang sangat dinamis terlihat dari adanya perubahan pertaturan perundungan dari pemerintah (pusat) menjadi tantangan bagi sekretariat DPRD dalam melakukan pelayanan kepada DPRD dalam mengantisipasi perubahan tersebut.

- 4) Lokasi Kantor DPRD yang berada jauh dari masyarakat, menyebabkan frekuensi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat kepada Wakil Rakyat lebih rendah dibandingkan Kantor DPRD yang lama. Hal ini menjadi tantangan bagi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.

Disisi lain, terdapat peluang yang harus ditangkap oleh Sekretariat DPRD sebagai faktor yang menguntungkan sehingga bisa membantu dalam pencapaian target yang akan datang, antara lain:

- 1). Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD sebagai lembaga pemberi pelayanan kepada DPRD. Hal ini dalam rangka sinergi antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan legislatif (DPRD).
- 2). Adanya dukungan yang kuat dari DPRD terutama dari sisi penganggaran yang harus dimanfaatkan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra dan penelaahan terhadap tugas, fungsi dan kewenangan maka dapat disampaikan bahwa permasalahan di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 10.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sturktur Perangkat Daerah	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Umum dan Kehumasan	1. Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan	1. Kuatnya komitmen pimpinan daerah untuk mensinergikan peran eksekutif dan legislatif 2. Dukungan yang kuat dari DPRD	1. Lemahnya sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana

Struktur Perangkat Daerah	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>2. Lemahnya manajemen panganan administrasi surat menyurat</p> <p>3. Keberadaan Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum memadai</p> <p>4. Keterbatasan kemampuan dan kesadaran aparatur dalam mengelola informasi dan referensi</p> <p>5. Pelayanan yang belum optimal dan tepat sasaran</p> <p>6. Minimnya sarana baca dan referensi</p> <p>7. Pola penanganan Keprotokolan yang belum profesional dan tepat</p> <p>8. Tidak terkelolaanya data base dokumentasi</p>	<p>3. Profesionalisme dalam menata administrasi melalui pola penataan secara manual dan digital</p> <p>4. Penyediaan dan penempatan SDM yang memiliki kompetensi pada bidang-bidang yang tepat</p> <p>5. Adanya kebijakan penambahan sarana dan prasarana</p> <p>6. Tersajinya data dan informasi perkembangan pembangunan</p> <p>7. Tersedianya sarana baca, buku, jurnal, dan multimedia yang memadai dan baik</p> <p>8. Peningkatan kemampuan dan pemahaman aparatur terhadap tata letak acara dan pelayanan</p>	<p>3. Belum tersedianya aplikasi pendukung</p> <p>4. Rendahnya kemampuan aparatur</p> <p>5. Dukungan anggaran belum maksimal</p> <p>6. Pengetahuan dan pengelolaan data dan informasi serta penguasaan teknologi informasi yang masih minim</p> <p>7. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dan menunjang</p> <p>8. Kurang minatnya aparatur untuk menimba wawasan dan melakukan inovasi baru dan monoto</p>
Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan	<p>1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal</p> <p>2. SDM yang</p>	<p>1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>2. Peningkatan Kualitas SDM agar lebih</p>	<p>1. Masih terbatasnya dukungan anggaran</p> <p>2. Lemahnya komitmen dan semangat</p>

Struktur Perangkat Daerah	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kurang memadai dan responsif dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.	profesional	aparatur
Keuangan dan Perencanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pertanggung jawaban yang belum tertata dengan baik 2. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur dalam mengelola dan menganalisis data 3. Penguasaan teknologi informasi Pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas 4. Kemampuan dan kesigapan dalam verifikasi data yang perlu dipertajam dan lebih teliti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian pola pertanggungjawaban sesuai dengan SAP dan membangun alur pelayanan yang sistematis 2. Peningkatan kemampuan aparatur secara berjenjang 3. Membangun sistem perencanaan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan 4. Sistem verifikasi digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kesepahaman dan keseragaman dalam pertanggungjawaban dan pola pelayanan 2. Tidak tersedianya software dan perlengkapan digital bagi menunjang tugas 3. Masih lemahnya kemampuan aparatur dalam memahami kebutuhan perencanaan 4. Tidak sistematis dan tertibnya pola pelayanan yang berlaku dan ditetapkan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 disebutkan bahwa Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima).

Dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah, ada 5 (lima) misi yang akan ditempuh, yaitu :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

Merujuk kepada pernyataan visi dan misi diatas maka pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada dasarnya adalah pelayanan berdasarkan pada fungsi-fungsi utama DPRD, yaitu Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan. Selain itu, berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, Sekretariat DPRD memiliki peranan yang sangat penting sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyelenggaraan administrasi kesekretariatan maupun keuangan. Untuk itu, Sekretariat DPRD sangat diperlukan kehadirannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih diatas.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi DPRD maka Sekretariat DPRD mendukung pada upaya pencapaian misi ke-3 yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Dalam rangka pencapaian misi, berdasar tugas dan fungsi ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian misi tsb seperti yang tergambaran pada tabel berikut

Tabel 11.
Hasil Analisis Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Sekretariat DPRD dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	(Masalah Pokok) Permasalahan Pelayan Perangkat Daerah	(Masalah) Faktor pendorong	(Akar Masalah) Faktor penghambat
Misi 2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan. Tujuan : 2.1 Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif 2.1.2 Sasaran : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	<p>1.Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan</p> <p>2.Lemahnya manajemen panganan administrasi surat menyurat</p> <p>3. Keberadaan Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum memadai</p> <p>4. Keterbatasan kemampuan dan kesadaran aparatur dalam mengelola informasi dan referensi</p> <p>5.Pelayanan yang belum optimal dan tepat sasaran</p> <p>6.keprotokolan yang belum profesional dan tepat</p>	<p>1. Kuatnya komitmen pimpinan daerah untuk mensinergikan peran eksekutif dan legislatif</p> <p>2.Dukungan yang kuat dari DPRD</p> <p>3.Profesionalisme dalam menata administrasi melalui pola penataan secara manual dan digital</p> <p>4.Penyediaan dan penempatan SDM yang memiliki kompetensi pada bidang-bidang yang tepat</p> <p>5.Adanya kebijakan penambahan sarana dan prasarana</p> <p>6.Tersajinya data dan informasi perkembangan pembangunan</p> <p>7.Tersedianya sarana baca, buku, jurnal, dan multimedia yang memadai dan baik</p> <p>8.Peningkatan kemampuan dan</p>	<p>1.Lemahnya sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas</p> <p>2.Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana</p> <p>3.Belum tersedianya aplikasi pendukung</p> <p>4.Rendahnya kemampuan aparatur</p> <p>5.Dukungan anggaran belum maksimal</p> <p>6.Pengetahuan dan pengelolaan data dan informasi serta penguasaan teknologi informasi yang masih minim</p> <p>7.Sarana dan prasarana yang tidak memadai dan menunjang</p> <p>8.Kurang minatnya aparatur untuk menimba wawasan dan melakukan inovasi baru dan monoto</p>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	(Masalah Pokok) Permasalahan Pelayan Perangkat Daerah	(Masalah) Faktor pendorong	(Akar Masalah) Faktor penghambat
	<p>7. Tidak terkelolaanya data base dokumentasi</p>	pemahaman aparatur terhadap tata letak acara dan pelayanan	
	<p>1.Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal 2.SDM yang kurang memadai dan responsif dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.</p>	<p>1.Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 2.Peningkatan Kualitas SDM agar lebih profesional</p>	<p>1.Masih terbatasnya dukungan anggaran 2.Lemahnya komitmen dan semangat aparatur</p>
	<p>1.Sistem pertanggung jawaban yang belum tertata dengan baik 2.Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data 3.Penguasaan teknologi informasi Pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas 4.Kemampuan dan kesigapan dalam verifikasi data yang perlu dipertajam dan lebih teliti</p>	<p>1.Penyesuaian pola pertanggungjawaban sesuai dengan SAP dan membangun alur pelayanan yang sistematis 2.Peningkatan kemampuan aparatur secara berjenjang 3.Membangun sistem perencanaan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan 4.Sistem verifikasi digital</p>	<p>1.Belum adanya kesepahaman dan keseragaman dalam pertanggungjawaban dan pola pelayanan 2.Tidak tersedianya software dan perlengkapan digital bagi menunjang tugas 3.Masih lemahnya kemampuan aparatur dalam memahami kebutuhan perencanaan 4.Tidak sistematis dan tertibnya pola pelayanan yang berlaku dan ditetapkan</p>

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Rentra

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak terkait secara langsung dengan kementerian/lembaga, sehingga pada bagian ini tidak dilakukan analisis keterkaitan permasalahan dalam pencapaian visi, misi dan sasaran Renstra Kementerian/lembaga.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak terkait secara langsung dengan struktur dan pola ruang yang diatur dalam RTRW. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh sekretariat DPRD dilakukan sesuai dengan peruntukan pusat pemerintahan di Pulau Dompak. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD meliputi sebanyak 2 program. Dari hasil analisis kajian lingkungan strategis Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa semua program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tidak memberikan dampak terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Kunci keberhasilan suatu PD seringkali berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah karena masing-masing organisasi memiliki spesifikasi atas tugas, fungsi dan kewenangannya. Untuk itu, merujuk pada subbab II. 1, II. 2, II. 3 dan II. 4 diatas, penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD dapat dilakukan sebagai sebagai berikut :

Tabel 12.
Penentuan Nilai Isu Strategis

No	Isu / Permasalahan	Nilai Berdasarkan Kriteria (skala 1 – 10)						Total Score
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan legislasi,	10	10	10	10	5	0	45

No	Isu / Permasalahan	Nilai Berdasarkan Kriteria (skala 1 – 10)						Total Score
		1	2	3	4	5	6	
	penganggaran, dan pengawasan							
2	Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai.	10	10	5	5	8	0	38
3	Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelayanan kepada DPRD yang berkualitas.	10	10	5	5	5	0	35
4	Sistem pelayanan yang masih minim dan belum tepat sasaran	10	10	5	5	2	0	32

Keterangan Kriteria :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD sesuai tupoksi
3. Memiliki dampak yang besar terhadap publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan

Melihat pada tabel diatas maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
2. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelayanan kepada DPRD yang berkualitas.
4. Sistem pelayanan yang masih minim dan belum tepat sasaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan terkait dengan Tujuan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 13.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan		Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	(Hasil Survey Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD : Sumber Data Laporan Akhir Kegiatan)	Skor	68	70	72	74	76	78	80	80
	1.Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	Layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD sesuai SOP : Total Layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Rapat yang terlaksana : Jumlah rapat yang terjadwan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	fasilitasi penyusunan laporan reses DPRD : Jumlah laporan reses per anggota DPRD X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	jumlah pembahasan anggaran yang dilaksanakan : jadwal pembahasan	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			anggaran menjadi perda									
	2.Meningkat nya layanan administrasi dan keuangan DPRD	Percentase layanan administrasi keuangan DPRD	layanan Administrasi Keuangan DPRD Sesuai SOP : Total Layanan Administrasi Keuangan DPRD X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Percentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	Usur kegiatan pengumpulan data kinerja : Total unsur kegiatan pengumpulan data kinerja X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Percentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD yang disusun : jumlah laporan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
	3.Terpenuhi nya kebutuhan sarana prasarana sekretariat DPRD	Percentase kecukupan sarana prasarana	Barang Inventaris yang Kondisi Baik : Total Barang Inventaris X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi : total tenaga ahli fraksi yang direncanakan X 100. (tenaga ahli fraksi 1 (satu)	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			orang untuk setiap fraksi X 8 fraksi=8 orang									
		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian : Jumlah seluruh urusan	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase kecukupan penunjang fasilitas	Jumlah terlaksananya sub kegiatan : jumlah sub kegiatan yang direncanakan X100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan : total rekening yang terencanakan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan milik daerah	Jumlah barang yang terpelihara : jumlah barang milik daerah X 100	%	n/a	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	Jumlah fraksi DPRD mendapat layanan administrasi : Jumlah fraksi DPRD X100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Sementara itu kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 14.
Strategi dan Kebijakan

Visi :” Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya” .								
Misi 2 : Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan								
No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	1	Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan	1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD dan layanan Anggota DPRD	1	Menetapkan pola pelayanan yang profesional dan prima kepada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	1	Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			2	Meningkatnya layanan administrasi dan keuangan DPRD	2	Meningkatkan penerapan SOP dalam pelayanan administrasi dan keuangan	2	Peningkatan pelayanan administrasi keuangan
			3	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD	3	Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana sekretariat DPRD secara baik	3	Pengadaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Setiap program memiliki indikator kinerja outcome, sedangkan kegiatan memiliki indikator kinerja output. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan :

9. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Fraksi DPRD

II. PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Kegiatan :

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1. Pembahasan APBD

3. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Pendalaman Tugas DPRD
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kegiatan :

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Pelaksanaan Reses

Kegiatan :

5. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan disampaikan seluruh bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan beserta dengan indikator dan target capaian kinerjanya yang akan dijabarkan dalam Renja Sekretariat DPRD.

7.1 indikator kinerja urusan pemerintahan daerah

Tabel 15.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Proyeksi tahun berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						PD Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja akhir RPJMD	
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Skor	68	70	72	74	76	78	80	80	Sekretariat DPRD

7.2 indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Proyeksi tahun berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						PD Penanggung Jawab	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Skor	68	70	72	74	76	78	80	80	80	Sekretariat DPRD
2	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	%	94	96	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
3	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4	Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5	Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
6	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	%	94	96	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
7	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Proyeksi tahun berjalan	Target Capaian Setiap Tahun						PD Penanggung Jawab	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	Persentase kecukupan sarana prasarana	%	94	96	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
10	Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
11	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
12	Persentase kecukupan penunjang fasilitas	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
13	Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
14	Persentase pemeliharaan milik daerah	%	94	96	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
15	Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

BAB VIII

PENUTUP

Renstra ini merupakan rencana yang disusun dalam rangka mencapai target selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 – 2026. Selanjutnya, Renstra ini juga perlu difahami dan dilaksanakan oleh seluruh bagian dan dijaga konsistensinya dengan implementasi tahunan (Renja). Untuk menjaga hal-hal tersebut, dituangkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

8.1 Pedoman Transisi

Sesuai dengan kaidah transisi dalam pelaksanaan perencanaan dan dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan setelah Renstra berakhir, maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 akan menjadi pedoman penyusunan Renja tahun 2022 (Renja transisi). Selanjutnya Renja tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pada periode berikutnya. Melalui Renja transisi tersebut diharapkan masalah-masalah yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode Renstra baru dapat terselesaikan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra yang kemudian dituangkan menjadi Renja tahunan untuk difokuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan Renstra ini, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Renstra yang telah disusun ini harus mendapat komitmen penuh dari Sekretaris dan seluruh staf Sekretariat DPRD untuk dilaksanakan. Untuk itu, setiap bagian diminta berperan serta dan bekerjasama dalam menyukseskan pelaksanaan Renstra ini.
- b. Renstra ini akan menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh bagian dalam menyusun Renja SKPD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

- c. Untuk menjalankan Renstra ini, dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - i. Penjabaran Renstra melalui penyusunan Renja oleh Kepala SKPD sebagai bentuk pengendalian bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ii. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, perlu dilaksanakan evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode dan evaluasi akhir periode lima tahunan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.
- d. Pembiayaan bagi pelaksanaan Renstra ini bukan hanya menjadi beban APBD Provinsi Kepulauan Riau, namun secara bersama-sama atau masing-masing dapat juga berasal dari alokasi dana APBN maupun sumber dana lain seperti bantuan pihak ketiga dan luar negeri yang tidak mengikat.
- e. Dalam hal terjadi perkembangan dan perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan, apabila diperlukan, dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap target indikator kinerja untuk mengikuti perubahan lingkungan strategis selama dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

LAMPIRAN

Rencana Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub 3	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi									
									Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1				2	USUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD																					20	21				
1				4	USUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																										
2				4 02	SEKRETARIAT DPRD																										
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan			4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																						Sekretariat DPRD				
					Percentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		%	12	12	100					100			100			100			100							
1	Meningkatnya layanan administrasi dan keuangan DPRD	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	4 02 01 1.01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			1	558,540,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
1				POHON K	4 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	1	158,540,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
2					4 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	12	12	1	110,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
3					4 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	12	12	1	110,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
4					4 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
5					4 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	1	105,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
2	Meningkatnya layanan administrasi dan keuangan DPRD	Persentase persentase pengumpulan data kinerja DPRD	4 02 01 1.02	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri			
					Percentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	%			100	43,926,131,038	100	50,656,896,237	100	54,185,030,697	100	57,966,132,398	100	62,018,339,091	100	62,018,339,091	100	62,018,339,091	100	62,018,339,091	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri					
1				POHON K	4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	14	42,818,131,038	14	49,206,896,237	14	52,735,030,697	14	56,516,132,398	14	60,568,339,091	14	60,568,339,091	14	60,568,339,091	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri					
2					4 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	768,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri					
3					4 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	120,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri					
4					4 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	1	120,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri					
5					4 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	12	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Anggota DPRD	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			%			100			100			100			100			100	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
						Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Bulan	n/a	n/a	12	700,000,000	12	1,100,000,000	12	1,100,000,000	12	1,350,000,000	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
1		POHON K	4 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAKET	12	12	178	300,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	1	650,000,000	1	650,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
2			4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang			60	200,000,000	60	300,000,000	60	300,000,000	60	350,000,000	60	450,000,000	60	450,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
3			4 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			60	100,000,000	60	150,000,000	60	150,000,000	60	200,000,000	60	200,000,000	60	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
4			4 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			60	100,000,000	60	150,000,000	60	150,000,000	60	200,000,000	60	200,000,000	60	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
4	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Anggota DPRD	Persentase kecukupan penunjang fasilitas	4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			%	n/a	n/a	100			100			100			100			100	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
					Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	n/a	n/a	12	10,000,000,000	12	15,989,103,763	12	17,453,887,315	12	20,006,774,504	12	22,746,000,000	12	22,746,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
1		POHON K	4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	1	1	150	800,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,250,000,000	1	1,850,000,000,00	1	1,850,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
2			4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	-	3	12	5,000,000,000	1	8,689,103,763	1	9,153,887,315	1	10,396,000,000	1	10,396,000,000	1	10,396,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
3			4 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	12	4,000,000,000	1	6,000,000,000	1	7,000,000,000	1	8,060,774,504	1	9,000,000,000,00	1	9,000,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
4			4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	3	80	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,500,000,000,00	1	1,500,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
5	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Anggota DPRD	Persentase Kecukupan sarana Prasarana Anggota DPRD	4 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			%	94	96	100			100			100			100			100	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
					Jumlah aset yang diadakan	Unit			10	1,970,000,000	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	10	3,000,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
1		POHON K	4 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	PAKET			100	400,000,000,00	1	400,000,000,00	1	400,000,000,00	1	400,000,000,00	1	400,000,000,00	1	400,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
2			4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	15	70,000,000,00	15	70,000,000,00	15	70,000,000,00	15	70,000,000,00	15	70,000,000,00	15	70,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
3			4 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	500,000,000,00	1	680,000,000,00	1	680,000,000,00	1	680,000,000,00	1	680,000,000,00	1	680,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
4			4 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			6	500,000,000,00	6	1,000,000,000,00	6	1,000,000,000,00	6	1,000,000,000,00	6	1,000,000,000,00	6	1,000,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri		
5			4 02 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			6	500,000,000,00	6	850,000,000,00	6	850,000,000,00	6	850,000,000,00	6	850,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Anggota DPRD	Persentase ketersedian kelancaran perkantoran	4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%			100			100			100			100		Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
1		POHON K	4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	4	1,200,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
2			4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	12	2,894,855,927	1	4,891,005,787	1	5,891,005,788	1	6,000,000,000	1	6,249,286,015	1	6,249,286,015	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
7	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Anggota DPRD	Persentase pemeliharaan milik daerah	4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	94	96	100			100			100			100		Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
		POHON K	4 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			60	80,000,000,00	60	80,000,000,00	60	80,000,000,00	60	80,000,000,00	60	80,000,000,00	60	80,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
			4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			60	20,000,000,00	60	20,000,000,00	60	20,000,000,00	60	20,000,000,00	60	20,000,000,00	60	20,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
			4 02 01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit			5	80,000,000,00	5	80,000,000,00	5	80,000,000,00	5	80,000,000,00	5	80,000,000,00	5	80,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
			4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			8	400,000,000,00	8	1,000,000,000,00	8	1,000,000,000,00	8	1,000,000,000,00	8	1,000,000,000,00	8	1,000,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
			4 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit			500	1,000,000,000,00	500	2,020,000,000,00	500	2,020,000,000,00	500	2,020,000,000,00	500	2,020,000,000,00	500	2,020,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
			4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
			4 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	4	300,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
			4 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			8	300,000,000,00	8	300,000,000,00	8	300,000,000,00	8	300,000,000,00	8	300,000,000,00	8	300,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan DPRD	Persentase ketersedian laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				%			100			100			100			100		Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir					
									2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya	%			100	650,000,000,00	100	1,300,000,000,00	100	1,300,000,000,00	100	1,300,000,000,00	100	1,300,000,000,00	100	1,300,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
		POHON K	4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan			12	100,000,000,00	13*45	200,000,000,00	12*45	200,000,000,00	12*45	200,000,000,00	12*45	200,000,000,00	12*45	200,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
			4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaiian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaiian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Pakaiian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	PAKET			225	350,000,000,00	1	650,000,000,00	1	650,000,000,00	1	650,000,000,00	1	650,000,000,00	1	650,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
			4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang			45	200,000,000,00	45	450,000,000,00	45	450,000,000,00	45	450,000,000,00	45	450,000,000,00	45	450,000,000,00	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
9	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Anggota DPRD	Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	4 02 01 1.16	Layanan Admininstrasi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%			100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
					Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	Bulan			12	200,000,000,00	12	450,924,423,83	12	703,600,000,00	12	703,600,000,00	12	703,600,000,00	12	703,600,000,00				
		POHON K	4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan			8	200,000,000,00	1	450,924,423,83	1	703,600,000,00	1	703,600,000,00	1	703,600,000,00	1	2,761,724,424	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
II			4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						88,245,002,823		71,710,404,638		68,974,967,719		69,434,074,648		70,174,076,926		70,174,076,926	Sekretariat DPRD			
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan																							
1	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			%			100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
1		POHON K	4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	100	100	1	500,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
2			4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	-	1	7	500,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
3			4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	-	1	1	300,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4				4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	-	1	1	300,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
2	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	4 02 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			%			100			100			100			100			Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
						Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	Dokumen			2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000		
1		POHON K	4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen			2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
3	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Anggota DPRD	Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			%	n/a	n/a	100			100			100			100			Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
						Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%			100	13,003,300,790	100	8,400,000,000	100	5,400,000,000	100	5,859,106,929	100	5,859,106,929	100	5,859,106,929		
1		POHON K	4 02 02 1.04 02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		45	4,500,000,000	1	3,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
2			4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen		250	1,000,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	302,090,032	1	302,090,032	1	302,090,032	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
3			4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		2	1,003,300,790	36	750,000,000	36	750,000,000	36	750,000,000	36	750,000,000	36	750,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
4			4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		36	2,000,000,000	36	1,800,000,000	36	1,800,000,000	36	1,807,016,897	36	1,807,016,897	36	1,807,016,897	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
5			4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen		24	4,500,000,000	1	2,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
4	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			%			100			100			100			100			Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
						Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	Dapil		7	36,391,702,033	7	30,452,675,576	7	30,676,774,757	7	30,676,774,757	7	30,676,774,757	7	30,676,774,757			
1		POHON K	4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		495	7,191,702,033	1	1,252,675,576	1	1,476,774,757	1	1,476,774,757	1	1,476,774,757	1	1,476,774,757	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
2			4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pidiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pidiran DPRD yang Disusun	Dokumen		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
3			4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		7	29,000,000,000	1	29,000,000,000	1	29,000,000,000	1	29,000,000,000	1	29,000,000,000	1	29,000,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir				
									2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Percentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	4 02 02 1.08	02	Fasilitasi Tugas DPRD		%			100		100		100		100	0	100		100		Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri
						Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	%			100	36,750,000,000	100	31,357,729,062	100	31,398,192,962	100	31,398,192,962	100	32,138,195,240	100	32,138,195,240		
		POHON K	4 02 02 1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		2970	36,000,000,000	1	30,707,729,062	1	30,748,192,962	1	30,748,192,962	1	31,488,195,240	1	31,488,195,240	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
			4 02 02 1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
			4 02 02 1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		24	350,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
			4 02 02 1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		12	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat DPRD	Provinsi Kepri	
			JUMLAH							152,824,529,787		156,098,334,849		159,608,491,519		166,760,581,550		174,691,302,032		174,691,302,032			
